

**PENERAPAN NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL
NEGARA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**FRISCA MARSELA TANASELA
FLORENCE D. J. LENGKONG
FEMMY. TULUSAN**

Abstract : The implementation of mental revolution value is a mind program from president of republic Indonesia. But the implementation of the program is not run smoothly at this moment cause there are many problems happen in the implementation of mental revolution such as beliefness, hope, compasionate, and civil cocupation as a subjec.

This research uses qualitative research methods. Informant research by as much as 10 (ten) the informant i.e. consists of 1 head of the Agency, 1 Secretary, 1 head of the Agency, then 2 officers and 2 community. Data collection techniques used i.e., interview techniques, techniques of observation/observation, and technical documentation. As well as the Data analysis techniques used for Data Reduction, namely, The Presentation of Data, as well as the withdrawal of conclusions based on research conducted the nation's Unity in the body of researchers and politics of North Minahasa Regency researched through observation, reality as well as data or documents such as the report of the performance government agencies, strategic plan, a long-term plan. The conclusion can be drawn in the research in the body of the unity of the nation and the Politics of North Minahasa Regency in implementing a Mental revolution of values through 4 Filosofi basic Mental Revolution values as follows:

Keyword : The values of the revolution mental, Civil State Apparatus

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Pemerintah dan masyarakat berarti kita berbicara mengenai Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya.

Sebagai seorang pemimpin yang juga merupakan sumber daya manusia, tak lepas dari sorotan publik dimana pemerintah yang mengemban tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai memberi pelayanan kepada

masyarakat dituntut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga harus memiliki etika dan perilaku yang baik agar keberlangsungan proses pemberian pelayanan dapat berjalan dengan semestinya. Masyarakat pun sebagai penerima pelayanan dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.

Namun pada hakikatnya dizaman reformasi birokrasi ini masih banyak terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh buruknya pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perilaku dan etika yang buruk yang kerap kali ditunjukkan oleh pemerintah seakan-akan telah hidup membudaya dan telah menjadi karakter buruk dari para pemberi pelayanan. Banyaknya

praktek-praktek penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai penyakit-penyakit birokrasi lainnya tumbuh menjamur dikalangan pemerintah. Aparatur sipil negara yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik dan benar. Masyarakatpun yang terhimpit oleh keadaan yang disebabkan oleh pemberian pelayanan yang buruk mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti memberikan sejumlah imbalan agar keperluannya cepat terlayani. Hal ini begitu meresahkan sebagian besar rakyat kecil yang hanya menggantungkan harapannya pada pemberian pelayanan yang sesuai dengan undang-undang, mereka yang memiliki kekuasaan, uang, dan jabatan dapat menerima pelayanan dengan cepat dan baik sedangkan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, uang dan jabatan tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya dalam pembuatan ktp, kartu keluarga, atau keperluan-keperluan administrasi lainnya agar cepat untuk dilayani maka masyarakat harus memberi sejumlah imbalan kepada si pemberi pelayanan tersebut hal seperti ini seakan akan telah menjadi rahasia umum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahkan aparatur sipil negara yang “nakal” ini tidak lagi malu dan terang-terangan untuk meminta sejumlah uang sebagai stimulus untuk memperlancar pekerjaan yang dikerjakannya. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini terjadi bukan hanya karena sifat dan

karakter si pemberi pelayanan namun juga karena keadaan prosedur yang berlebihan yang mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan sejumlah aparatur sipil negara yang “nakal” untuk mengambil keuntungan.

Hal ini perlahan-lahan mendorong masyarakat untuk menuntut adanya suatu perubahan, bukan hanya janji-janji manis yang sering di ucapkan pemerintah ketika ingin mengambil hati rakyatnya pada pemilihan saja namun ada nya bukti nyata berupa perubahan karakter pemerintah secara signifikan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat situasi seperti ini dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 lalu memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat akan perubahan karakter dari aparatur sipil negara sebagai pemberi pelayanan publik. Lewat ke-9 agenda prioritas Nawa Cita pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terutama Nawa Cita ke delapan untuk melakukan revolusi karakter bangsa, dan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Indonesia tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 dimana salah satu agenda dalam Reformasi Birokrasi adalah dilakukan Revolusi Mental para Aparatur Sipil Negara.

Begitupula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara yang merupakan salah satu badan yang ada di pemerintahan kabupaten Minahasa Utara yang tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga turut memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat, serta dalam mengurus setiap hal yang berkaitan dengan perijinan-perijinan organisasi dan dalam penanganan konflik-konflik SARA yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara dituntut untuk memiliki karakter yang baik dengan mencerminkan Etika dan Perilaku sebagai pemberi pelayanan, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun ternyata berdasarkan isu yang berkembang ditengah masyarakat bahwa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara masih belum mampu mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat akibat Etika serta perilaku yang ditunjukkan oleh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kabupaten Minahasa Utara yang masih belum mencerminkan Revolusi mental sebagaimana salah satu yang menjadi agenda pemerintah yaitu untuk melakukan revolusi karakter bangsa yang didalamnya bertujuan untuk menghadirkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu akibat proses yang terlalu berbelit-belit membuat masyarakat yang akan mengurus perizinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara merasa dirugikan karena banyak hal yang seharusnya mudah untuk dilaksanakan namun menjadi lebih sulit karena buruknya kinerja Aparatur sipil Negara yang ada disana. Atas dasar isu yang berkembang tersebut peneliti tertarik untuk melihat secara langsung apakah aparatur sipil negara yang berada khususnya di badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten minahasa utara benar telah menerapkan nilai-nilai revolusi mental sebagai acuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya atau malah sebaliknya sebagaimana isu yang berkembang ditengah masyarakat. Untuk itu peneliti mengangkat sebuah judul penelitian mengenai “Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Utara”.

Penerapan

penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Nilai-nilai

McShane dan Von Glinow (2010:47) berpendapat bahwa nilai-nilai adalah keyakinan yang stabil dan evaluatif yang menunjukkan preferensi kita untuk hasil atau tindakan dalam berbagai situasi. Merupakan persepsi tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah. Nilai-nilai berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan motivasi, keputusan dan tindakan kita. Nilai-nilai berhubungan dengan konsep diri karena sebagian mendefinisikan siapa kita sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dengan nilai-nilai yang sama.

Revolusi mental

Revolusi Mental adalah perubahan mendasar yang relatif cepat dalam cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Revolusi mental menurut presiden Joko Widodo adalah revolusi jiwa bangsa dari jiwa budak yang negativisme ke jiwa merdeka yang penuh dengan keunggulan atau positifisme

Menurut Hendrik Lim, MBA dkk dalam bukunya "Indonesia Baru Mental Baru" (hal 52-56) mengemukakan ada 4 filosofi dasar dalam menggerakkan Revolusi Mental.

a. Harus ada rancangan Harapan, yang berisi janji kemajuan dan perbaikan
Supaya berhasil dan bisa mengajak ke peserta, keterlibatan stakeholders, maka aksi revolusi mental harus punya gambaran yang jelas: perbaikan apa yang akan dihasilkan ketika revolusi mental berhasil dilaksanakan; apa saja kemajuan atau peningkatan tara hidup yang bisa dinikmati dari waktu ke waktu. Dengan

kata lain gambaran terminal tujuan dan trik pencapaian (miles stone) ini harus jelas.

b. Harus ada desain Belief, keyakinan dan Nilai operasional

Untuk memastikan perjalanan Revolusi mental tidak offside atau menciut kembali ke titik awal, maka perlu suatu patokan keyakinan. Keyakinan berisi tentang hal-hal yang kita percayai meskipun kita belum melihatnya terjadi secara fisik. Neuroscience dan psikologi perilaku akan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dipercayai seseorang akan mempengaruhi perilaku dan tindakan. Tidak saja mempengaruhi respons, keyakinan juga mempengaruhi hasil. Oleh karena itu perlu dibentuk dan disepakati apa saja Nilai dan Keyakinan kolektif yang harus dipegang erat oleh stakeholder alias citizen dalam mengarungi proses revolusi mental.

c. Harus ada Compassionate, dalam mengeksekusi revolusi mental

Revolusi dan reformasi sikap mental bukan perkara gampang. Ini perkara yang amat sulit. Apalagi kalau kita bicara mental. Kita mendekonstruksikan alam bawah sadar. Mental menyangkut kebiasaan yang telah hidup melekat amat lama dalam suatu masyarakat. Ia bersifat mengikat dan tidak mudah melepaskannya. Ia sesuatu yang intangibles, bukan hal fisik, tetapi sangat mempengaruhi alam tindakan dan bentuk proses suatu peristiwa berlangsung.

Oleh karena itu usaha revolusi mental harus didasari oleh motive yang benar, tulus dan lurus. Dengan kata lain seorang penggerak dan pelopor revolusi mental harus jiwa *compassionate*. Ia bisa memahami kesulitan proses transformational dan merasa terpanggil untuk memfasilitasi proses tersebut; memiliki sensitivitas-empati dan pada saat yang bersamaan, tahu dengan persis apa yang hendak mereka ciptakan. Ini sama sekali tidak berarti sebuah gaya kepemimpinan yang serba permissive, alias pembiaran terhadap pelanggaran. Ia harus tegas dalam berbagai prinsip, tidak kompromi terhadap values namun fleksibel dalam pendekatan lapangan sesuai kondisi setempat.

d. Masyarakat sebagai subjek

Mengayunkan revolusi mental tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut terlibat. Dan supaya berhasil, masyarakat tidak bisa diletakan sebagai objek revolusi, tetapi ia harus menjadi subjek revolusi mental. Dengan filosofi seperti itu, barulah berbagai upaya untuk mengajak keterlibatan dan kepesertaan akan berhasil. Jika menempatkan masyarakat sebagai objek revolusi mental, maka masyarakat akan menjadi penonton, yang ketika diperlukan. Jika ditempatkan sebagai subjek ia akan menjadi project owner. Jika ditempatkan sebagai subjek akan timbul akuntabilitas terhadap keberhasilan program. Menempatkan masyarakat sebagai

subjek revolusi mental bukan hal mudah. Ia menuntut transformasi cara pandang dari pemimpin; terlebih lagi birokrat pemerintahan, yang bertugas dalam pelayanan publik.

Aparatur Sipil Negara

Dalam undang-undang no.5 tahun 2014 dalam bab 1 tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa Aparatur sipil negara yang kemudian disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015

Melalui peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019 didalamnya salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat makro untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan

akuntabel terdapat 3 program kerja yang salah satunya ialah Revolusi Mental Aparatur. Hasil yang diharapkan dari Revolusi Mental Aparatur ialah meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga terdapat dalam program quick wins reformasi birokrasi terdapat 9 program quick wins dan pada poin pertama program quick wins ini ialah untuk Kampanye Gerakan Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara. Kampanye ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lini pemerintahan dan lapisan masyarakat. Tujuannya untuk mengakselerasi perubahan Mindset aparatur sipil negara dari budaya priyayi ke budaya melayani; dan memberikan pesan kepada masyarakat tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yang didasari dari sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah penulis serta disesuaikan dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

Pembahasan

Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah-satu lembaga

pemerintah yang harus menjadi pelopor dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental. Dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental harus dimulai dari mental dan karakter individu pegawai masing-masing Pembahasan dalam penelitian skripsi ini menggunakan 4 filosofi dasar dalam menggerakkan Revolusi Mental yakni harus ada harapan (hope),keyakinan (belief), rasa iba (compassionate), subjek yakni masyarakat.

1. Harus ada harapan (hope)

Dalam Filosofi yang pertama yakni Harapan (Hope) yang harus dimiliki semua aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dapat ditarik beberapa indikator dapat menilai penerapan Revolusi Mental melalui Harapan (Hope) sebagai berikut : pertama janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program, kedua peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan, ketiga hasil pencapaian.

Indikator penilaian pertama mengenai janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara harus memperhatikan sejumlah masalah yang dihadapi terlebih dahulu, agar janji perbaikan dalam melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan permasalahan atau kendala yang sering di hadapi.

Indikator penilaian yang kedua yakni peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan. Dalam melihat peran aparatur sipil negara dalam pencapaian janji perbaikan melalui hasil pencapaian. Indikator

penilaian yang kedua yakni peran aparatur sipil negara atau pencapaian dari janji perbaikan dan indikator penilaian yang ketiga yakni hasil pencapaian memiliki hubungan yang erat, jika hasil pencapaian kinerja optimal maka peran ASN juga optimal maupun sebaliknya jika hasil kinerja belum optimal maka peran ASN juga belum optimal

2. Harus ada keyakinan (Belief)

Dapat dilihat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan filosofi yang kedua yaitu Harus ada Keyakinan (belief) dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental harus diperlukan landasan yang kuat dalam perjalanan Revolusi mental agar tidak offside atau menciut kembali ke titik awal, maka perlu suatu patokan keyakinan. Hadirnya Perjanjian Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dan dituang kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 agar semua ASN dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai serta penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental tidak salah arah.

Hasil realisasi yang didapatkan dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berfokus pada Nilai-Nilai Revolusi mental akan membuktikan bahwa perjanjian kerja yang dibuat bisa dilaksanakannya. Dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan filosofi yang kedua yakni Harus ada keyakinan (Belief) dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang harus ada landasan yang kuat, landasan dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam

memperkuat Keyakinan (Belief). Perjanjian Kerja dibuat agar realisasi dan pencapaian bisa optimal dan terbukti di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hasil realisasinya bisa 100% dan dikategorikan sangat baik namun yang menjadi kendala masih sedikitnya program yang berkaitan dengan Penrapan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang disusun dan hasilnya pun masih belum nampak di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat.

3. Harus ada Rasa Ibah (Compassionate)

Revolusi dan reformasi sikap mental bukan perkara gampang. Ini perkara yang amat sulit. Apalagi kalau kita bicara mental. Kita mendekonstruksikan alam bawah sadar. Mental menyangkut kebiasaan yang telah hidup melekat amat lama dalam suatu masyarakat. Ia bersifat mengikat dan tidak mudah melepaskannya. Ia sesuatu yang intangibles, bukan hal fisik, tetapi sangat mempengaruhi alam tindakan dan bentuk proses suatu peristiwa berlangsung.

Oleh karena itu usaha revolusi mental harus didasari oleh motive yang benar, tulus dan lurus. Dengan kata lain seorang penggerak dan pelopor revolusi mental harus jiwa *compassionate*. Ia bisa memahami kesulitan proses transformational dan merasa terpancung untuk memfasilitasi proses tersebut; memiliki sensitivitas-empati dan pada saat yang bersamaan, tahu dengan persis apa yang hendak mereka ciptakan. Ini sama sekali tidak berarti sebuah gaya kepemimpinan yang serba permissive, alias pembiaran terhadap pelanggaran. Ia harus

tegas dalam berbagai prinsip, tidak kompromi terhadap values namun fleksibel dalam pendekatan lapangan sesuai kondisi setempat.

Dalam melihat dan menilai adanya rasa Rasa Ibah (Compassionate) yang harus dimiliki para Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Minahasa Utara, terletak pada mental dan pribadi masing-masing individu dari ASN di Badan Kesbangpol. Setiap mental dan karakter yang dimiliki masing-masing individu sangat berbeda sehingga pemahaman mengenai penarapan Nilai-Nilai Revolusi Mental yang dimiliki ASN pasti juga berbeda.

Lingkungan juga menjadi salah satu yang mempengaruhi karakter dan mental yang dimiliki oleh ASN, dalam menciptakan sebuah karakter baru yang lebih baik yang tertuang ke dalam Nilai-Nilai Revolusi Mental harus dimulai dari mental dan karakter individu dari Aparatur Sipil Negara. Salah satu cara singkat dalam menilai perilaku dan mental melalui Rasa Ibah (Compassionate) yang dimiliki oleh ASN. Rasa Ibah (Compassionate) dari pegawai atau ASN menjadi tolak ukur dalam menilai suatu perilaku dan mental pegawai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental dapat dilihat melalui filosofi yang ketiga yakni Harus dimilikinya Rasa Ibah (Compassionate) dari pegawai atau ASN. Kenyataan yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara hanya beberapa

pegawai yang memiliki Rasa Ibah (Compassionate) terhadap pelayanan yang diberikan melalui pekerjaan yang dilaksanakan, dan terbukti dalam penelitian yang dilakukan ada cukup banyak pegawai dengan tulus dan ikhlas dalam melayani dan memberikan pelayanan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian. Hal tersebut dapat diukur berdasarkan kenyataan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara cukup banyak pegawai yang mampu menanamkan Nilai-Nilai Revolusi Mental terhadap mental dan karakter pegawai atau ASN dalam memberikan pelayanan melalui rasa Rasa Ibah (Compassionate) sehingga pelayanan yang diberikan menjadi berkualitas, ikhlas dan tulus. Namun tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa pegawai yang masih belum memiliki Rasa Ibah (Compassionate) akan melayani dan ada yang benar-benar tidak memiliki Rasa Ibah (Compassionate) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut terbukti sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti seperti ada beberapa pegawai yang benar-benar tidak memperdulikan kehadiran masyarakat yang datang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara seperti sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan pegawai atau ASN kepada masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental terhadap Rasa Ibah

(Compassionate) yang dimiliki oleh pegawai atau ASN sudah cukup banyak pegawai yang memiliki Rasa Ibah (Compassionate) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas namun juga ada beberapa pegawai yang belum memiliki dan ada yang benar-benar tidak memiliki Rasa Ibah (Compassionate) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Masyarakat sebagai subjek

Mengayunkan revolusi mental tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut terlibat. Dan supaya berhasil, masyarakat tidak bisa diletakan sebagai objek revolusi, tetapi ia harus menjadi subjek revolusi mental. Dengan filosofi seperti itu, barulah berbagai upaya untuk mengajak keterlibatan dan kepesertaan akan berhasil. Jika menempatkan masyarakat sebagai objek revolusi mental, maka masyarakat akan menjadi penonton, yang ketika diperlukan. Jika ditempatkan sebagai subjek ia akan menjadi project owner. Jika ditempatkan sebagai subjek akan timbul akuntabilitas terhadap keberhasilan program. Menempatkan masyarakat sebagai subjek revolusi mental bukan hal mudah. Ia menuntut transformasi cara pandang dari pemimpin; terlebih lagi birokrat pemerintahan, yang bertugas dalam pelayanan publik.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di Indonesia terlebih khusus penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental pada Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itulah

masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dalam penerapannya bukan sebagai objek dari penerapan. Untuk itu ajakan untuk keterlibatan masyarakat dalam merealisasikan penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental sangatlah penting.

Hal tersebut yang membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melibatkan masyarakat melalui pemahaman awal akan pentingnya Nilai-Nilai Revolusi mental. Dari berbagai program yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada dua program utama yang dikhususkan dalam merealisasikan Nilai-Nilai Revolusi Mental yakni Program Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan dan Program Terciptanya Kerukunan Umat Beragama melalui sosialisasi yang diadakan oleh Badan Kesbangpol.

Program Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan dan Program Terciptanya Kerukunan Umat Beragama menjadi program yang dikhususkan terhadap penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental dalam melibatkan masyarakat sebagai Subjek. Akan tetapi sebelum masyarakat dilibatkan, masyarakat harus mampu melaksanakan Nilai-Nilai Revolusi mental dalam memelihara hubungan yang baik kesesama masyarakat lain. Program Terpeliharaya Persatuan dan Kesatuan dan Program Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang diberikan dalam bentuk

sosialisasi pemahaman awal kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental sudah dilaksanakan melalui Program Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan dan Program Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang menjadi salah satu poin dalam Nilai-Nilai Revolusi Mental dan realisasinya pun mencapai 100%. Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang ada dua program mengenai Nilai-Nilai Revolusi Mental dalam pelaksanaan belum nampak dalam menciptakan pemahaman yang baru kepada masyarakat. Sehingga yang menjadi masukan peneliti Terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih banyak menyusun program yang mengandung Nilai-Nilai Revolusi Mental dan hasilnya pun harus mampu nampak hasilnya terlebih dalam membangun pemahaman dasar mengenai Nilai-Nilai Revolusi Mental di dalam masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara yang diteliti melalui pengamatan, kenyataan serta data ataupun dokumen seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana jangka panjang yang ada. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara dalam

Menerapkan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui 4 Filosofi dasar Nilai-Nilai Revolusi Mental yakni sebagai berikut

1. Harapan (hope), dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan filosofi yang pertama yakni Harus ada Harapan (Hope) sudah cukup dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui adanya janji perbaikan yang didasari dari berbagai kendala dan permasalahan yang ada di Badan Kesbangpol
2. Keyakinan (belief) dari penelitian yang dilakukan berdasarkan filosofi yang kedua yakni Harus ada Keyakinan (belief) yang harus dimiliki para pegawai atau ASN di Badan Kesbangpol, dan dapat ditarik kesimpulan penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui Filosofi yang kedua yakni Keyakinan (belief) sudah dimiliki dan itu terbukti dari adanya perjanjian kerja yang dirancang dan disusun oleh Badan Kesbangpol dalam menanamkan Nilai-Nilai Revolusi Mental
3. Rasa iba (compassionate) dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan filosofi yang ketiga yaitu Rasa iba (compassionate) sudah cukup dimiliki oleh ASN di Badan Kesbangpol yang terbukti dari cukup banyaknya pegawai yang memiliki Rasa iba (compassionate) dalam melayani sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi berkualitas, ikhlas dan tulus.
4. Subjek yakni masyarakat. dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan filosofi yang keempat Masyarakat sebagai subjek, berdasarkan

kenyataan yang ada Badan Kesbangpol sudah ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Draver, James. *A Dictionary of Psychology*. New York: Penguin Books, t.th.
- Dwiyanto Agus. 2011. *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- F, Patty, dkk. 1982. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hartono, Andreas 2016. *Revolusi mental seni berperang mengalahkan diri sendiri*. Medan: Sinergi Aksara
- Lim, Hendik dkk. 2016. *Indonesia Baru Mental Baru Kerangka Implementasi Revolusi Mental*. Jakarta: Defora Publisher
- Moleong, Lexy.j. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ofset
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri PAN dan RB No.11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2019, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Sekretariat kabinet RI PresidenRI.go.id. 2015. *Revolusi Mental*
- Silalahi, Ulber.2012. *Metodelogi Penelitian Social*. Bandung: PT.Reflika. Aditama
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumodiningrat, Gunawan & Wulandari, Ari. 2015. *Revolusi mental pembentukan karakter bangsa indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. 1994. Jakarta: Balai Pustaka: 646
- Wibowo. 2013. *Perilaku dalam organisasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sumber Lain:

- Makalah oleh Mulyono, Arif. *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Di daerah (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo)* Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1. Kecamatan Sidoarjo:
- Makalah *Patologi birokrasi* oleh Luthfiah Indah Rohanah. Malang. 2014
- Salunusa, Ardiles.2016. *Persepsi Mahasiswa Kristen Di Badan Kerohanian Kristen Fispol Unsrat*, program studi komunikasi: skirpsi tidak diterbitkan. Manado: Universitas Sam

Ratulangi